

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH JAWA TENGAH

(Studi Kasus pada KSPPS Tingkat Jawa Tengah Tahun 2016)

Atika Firda Zahriya, Jaka Isgiyarta<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone; +622476486851

## ABSTRACT

*This study was aimed analyze the sharia financial performance on health assessment of KSPPS in Central Java in the period of 2016. The analysis based on Deputy Regulation of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Republic of Indonesia Number: 07/Per/Dep.6/IV/2016. The samples amounted to 62 KSPPS units in Central Java which were determined by cluster proportionate random sampling technique. The method of data analysis in this study used descriptive statistics. The result of this study indicate that aspects of sharia financial performance are medium. The best aspect of sharia financial performance is the aspect of cooperation identity. While, the worst aspect of sharia financial performance is the aspect of independence and growth.*

*Keywords: Sharia Financial Performance, KSPPS Health Assessment, Sharia Cooperation*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah seharusnya mematuhi hukum Islam (*syariat*) yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk aspek perekonomian. Dalam perekonomian Islam, riba (bunga) merupakan sesuatu yang diharamkan dan sangat Allah benci. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275-279, bahwa Allah menghalalkan jual beli, memerintahkan untuk bersedekah, dan mengharamkan riba bagi orang yang beriman. Begitu pula yang dijelaskan dalam H.R. Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda “*Apabila riba dan zina sudah merajalela di suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk menerima adzab Allah.*” Hal tersebut membuktikan bahwa riba tidak baik untuk dipraktikkan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Maka, sebagai orang yang beriman, mematuhi hukum Islam (*syariat*) seperti menghindari dan menjauhi riba adalah suatu kewajiban.

Penerapan untuk patuh terhadap hukum Islam (*syariat*) diharapkan dilakukan secara serentak bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk menerima aturan agama (hukum Islam) tersebut untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah tersebut diharapkan dapat menjadi lembaga penyedia jasa keuangan secara syariah bagi masyarakat sehingga dapat membantu umat Islam terhindar dari riba.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Dengan kata lain, KSPPS memberikan kemudahan dalam penyediaan sumber modal kepada anggota, calon anggota, dan masyarakat menengah ke bawah yang akan melaksanakan usaha mikro agar mereka tidak terjebak pada rentenir yang memberikan kesulitan kepada peminjam karena tingginya biaya bunga.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Peran KSPPS dalam mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia tentunya tak lepas dari tujuan yang harus dicapai. Tujuan KSPPS tersebut yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, membangun serta meningkatkan potensi masyarakat dengan mendorong kemampuan dalam usaha mikro tanpa ada unsur bunga, perjudian, dan penipuan. Untuk mewujudkan kegiatan dan tujuan KSPPS dalam membantu dan mendukung perekonomian anggota khususnya dan masyarakat umumnya, maka KSPPS harus meningkatkan kualitas koperasi. Kualitas koperasi dilihat dari sertifikat penilaian kesehatan koperasi, pelaksanaan RAT rutin tiap tahunnya, peningkatan anggota koperasi, dan memiliki laporan keuangan yang baik. Kualitas koperasi akan berpengaruh pada keberhasilan koperasi tersebut. Ukuran keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari modal, volume usaha, dan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Koperasi di Indonesia cukup berhasil dalam meningkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun dengan menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Hal tersebut diketahui dari indikator jumlah koperasi yang meningkat di tahun 2016 yaitu 212.135 unit koperasi, diikuti dengan jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 37.783.160 orang. Begitu pula pada permodalan terjadi peningkatan dari 200 Triliun Rupiah tahun 2015, menjadi 242 Triliun Rupiah pada tahun 2016. Kemudian, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami kenaikan menjadi 266 Triliun Rupiah dan 17 Triliun Rupiah.

Jumlah KSP Konvensional tahun 2016 sebesar 11.952 unit koperasi. Di antara jumlah tersebut, 10.411 unit adalah koperasi aktif dan 1.541 adalah koperasi tidak aktif. Banyaknya jumlah unit koperasi, diikuti dengan anggota koperasi yang berjumlah 6.565.054 orang. Permodalan pada KSP Konvensional mencapai 20an Triliun Rupiah. SHU pada KSP Konvensional memiliki angka yang lebih tinggi dari volume usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa KSP Konvensional mampu memperbaiki manfaat ekonomi dan jasa koperasi kepada anggotanya.

Jumlah KSPPS tahun 2016 sebesar 3.159 unit koperasi. Di antara jumlah tersebut, 2.887 unit merupakan koperasi aktif dan 272 unit merupakan koperasi tidak aktif. Banyaknya jumlah unit koperasi, diikuti dengan anggota koperasi yang berjumlah 1.981.739 orang. Permodalan pada KSPPS hampir mencapai 8 Triliun Rupiah. SHU pada KSPPS memiliki angka yang lebih tinggi dari volume usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa KSPPS mampu memperbaiki manfaat ekonomi dan jasa koperasi kepada anggotanya. Berdasarkan hal tersebut, meskipun jumlah KSPPS tercatat 3.159 unit yang berkembang di Indonesia dan masih jauh dari KSP Konvensional yang jumlahnya 11.952 unit, dapat dikatakan bahwa KSPPS memiliki perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan kehadiran KSPPS yang masih baru di Indonesia dan mampu berkembang dengan persentase lebih dari 25% tiap tahunnya (Kemenkop UKM, 2016).

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, KSPPS tidak hanya memiliki perkembangan yang pesat, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik dari KSP Konvensional. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM), bahwa lebih baik koperasi dengan jumlah yang sedikit namun berkualitas seperti KSPPS, daripada koperasi dengan jumlah yang banyak tetapi tidak berkualitas dan hanya menjadikan beban karena banyak yang secara resmi dibubarkan akibat tidak melaksanakan RAT tiga tahun berturut-turut. Selain itu, penerapan hukum syariah lebih mudah dipraktikkan oleh nasabah seperti pada akad jual beli (*mudharabah*) dan bagi hasil. Sehingga, Suherman Rosyidi (Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur) memprediksi bahwa karena hal itulah KSPPS dapat berkembang dengan cepat diikuti dengan kualitas yang baik.

Perbandingan pertumbuhan dan perkembangan jumlah koperasi aktif antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa menunjukkan proporsi sebesar 52,2% koperasi aktif di Pulau Jawa dan 47,6% koperasi aktif berada di Luar Pulau Jawa. Pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki jumlah koperasi aktif terbesar di wilayah Pulau Jawa dan Indonesia, sedangkan Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali memiliki jumlah koperasi aktif terbesar di Luar Pulau Jawa. (Kemenkop UKM, 2016)

Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki ranking yang bersaing dalam kualitas koperasi. Hal tersebut dikarenakan jumlah koperasi aktif di Provinsi Jawa Timur lebih unggul dari Provinsi Jawa Tengah, yang otomatis keunggulannya diikuti oleh jumlah anggota perorangan koperasi, permodalan, volume usaha, dan SHU. Dengan demikian, penting bagi Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah untuk memperhatikan kinerja keuangan KSPPS dengan sebaik mungkin.

Kinerja keuangan KSPPS merupakan gambaran kondisi laporan keuangan KSPPS pada periode tertentu. Kinerja keuangan KSPPS perlu diketahui karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan demi perbaikan kualitas KSPPS. Untuk mengetahui kinerja keuangan KSPPS, dilakukanlah analisis laporan keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio. Hal yang dilakukan setelah perhitungan rasio yaitu mengukur tingkat kesehatan KSPPS atau yang disebut dengan Penilaian Kesehatan. Kementerian Koperasi dan UKM wajib melaksanakan penilaian kesehatan terhadap KSPPS. Dari penilaian kesehatan KSPPS, maka akan diketahui KSPPS yang memiliki kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Dalam penilaian kesehatan KSPPS, laporan keuangan yang baik akan mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula. Dengan demikian, penting bagi KSPPS untuk memberikan tanda berupa informasi mengenai kondisi kinerja keuangan kepada anggota, calon anggota maupun masyarakat yang ingin berkontribusi dengan KSPPS. Jika kinerja keuangan berkategori sehat atau cukup sehat, maka hal tersebut menjadi tanda bahwa KSPPS telah beroperasi dengan baik. Dengan demikian, KSPPS dapat menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan partisipasi, dan memberikan wawasan kepada masyarakat, akademisi, anggota, maupun calon anggota KSPPS. Selain itu, mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui KSPPS Indonesia di daerah manakah yang memiliki kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Penilaian kesehatan KSPPS tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan telah berhasil melakukan uji coba penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS di 14 Provinsi di Indonesia. Hasil uji coba penilaian kesehatan oleh KUKM menunjukkan bahwa KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang berhasil dinilai kesehatannya berjumlah 80 unit. Kriteria "Sehat" terdapat pada 8 unit, dimana 4 unit koperasi didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah. Kriteria "Cukup Sehat" terdapat pada 57 unit, dimana 14 unit koperasi didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kriteria "Dalam Pengawasan" terdapat pada 15 unit, dimana 4 unit koperasi didominasi oleh Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki penilaian kesehatan yang baik diantara provinsi yang lain.

Penulis fokus pada tahun 2016 dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada tahun 2016 mengalami tingkat tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, tahun 2016 menjadi tantangan bagi koperasi untuk mempersiapkan kinerja keuangan yang lebih untuk tahun selanjutnya. Kemudian, penulis tertarik meneliti pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 dikarenakan Jawa Tengah mengalami kenaikan tertinggi dalam koperasi tidak aktif dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Selain itu, jumlah koperasi aktif di Jawa Tengah lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah untuk menangani permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas KSPPS agar lebih baik.

## **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Laporan Keuangan Syariah**

Laporan keuangan KSPPS berisi informasi yang berkaitan dengan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam aktivitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa penerapan akuntansi syariah dalam laporan keuangan KSPPS mengacu pada SAK ETAP, PSAK Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pedoman akuntansi tersebut merupakan acuan yang harus diikuti oleh KSPPS dan USPPS Koperasi serta aparat pemerintah dan pihak lain yang terkait dalam menyusun laporan keuangan. Komponen laporan keuangan KSPPS meliputi neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan

perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan.

### **Kinerja Keuangan Syariah**

Kinerja keuangan adalah hasil kerja secara kuantitatif atas pengelolaan keuangan yang dilihat melalui analisis laporan keuangan. Laporan keuangan yang dianalisis dapat menunjukkan apakah kinerja keuangan KSPPS sudah baik/sehat atau belum. KSPPS yang berkriteria sehat menunjukkan bahwa KSPPS mampu mengelola laporan keuangan atau sumber daya yang lain dengan baik.

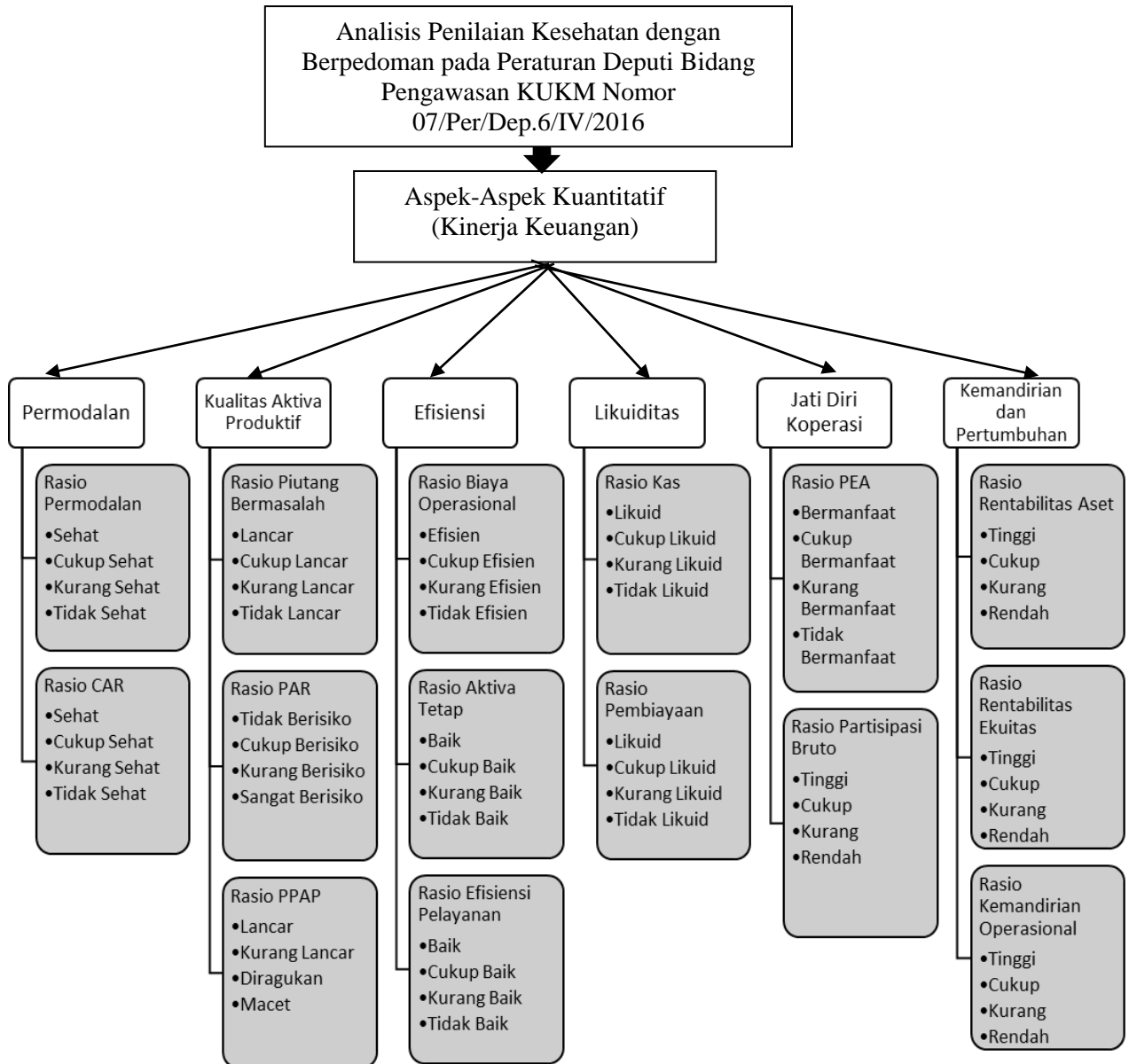
Kinerja keuangan KSPPS diukur berdasarkan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dalam KSPPS berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 mengenai pedoman penilaian kesehatan KSPPS. Analisis tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan pada suatu KSPPS, yang dilihat berdasarkan aspek-aspek kuantitatif, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, serta kemandirian dan pertumbuhan.

### **Penilaian Kesehatan KSPPS**

Kesehatan KSPPS merupakan kondisi kinerja usaha, keuangan, dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, penilaian kesehatan KSPPS adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS secara periodik. Dalam penilaian kesehatan KSPPS, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu melakukan penilaian terhadap 8 aspek yang terdiri dari 6 (enam) aspek kuantitatif dan 2 (dua) aspek kualitatif. 6 (enam) aspek kuantitatif tersebut yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, serta kemandirian dan pertumbuhan. Sedangkan 2 (dua) aspek kualitatif dalam penilaian kesehatan tersebut yaitu aspek manajemen dan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 6 variabel yang terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, serta kemandirian dan pertumbuhan. Semua variabel yang digunakan diukur dengan perhitungan rasio-rasio dengan rumus-rumus yang berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 mengenai pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Masing-masing rasio pada setiap aspek akan menghasilkan kriteria-kriteria kesehatan.

**Tabel 1.1**  
**Ukuran Variabel Penelitian**

No.	Variabel/Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)
1.	Permodalaan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	5
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $= \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	10
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $= \frac{\text{Jumlah pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $= \frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $= \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5
3.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $= \frac{\text{Biaya operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $= \frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $= \frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	2
5.	Likuiditas	a. Cash ratio $= \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima $= \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	15
6.	Jatidiri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto $= \frac{\text{Jumlah partisipasi bruto}}{\text{Jumlah partisipasi bruto + Transaksi non anggota}} \times 100\%$	5
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $= \frac{\text{MEP + SHU bagian anggota}}{\text{Total simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$	10

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi  
PEA = Promosi Ekonomi Anggota

No.	Variabel/Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)
7.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset = $\frac{\text{SHU sebelum nisbah, zakat dan pajaki}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas ekuitas = $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan = $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya operasional pelayanan}} \times 100\%$	4
TOTAL SKOR			75

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Jawa Tengah yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 yang aktif dan telah menyediakan Laporan Keuangan Tahunan, sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016, serta sudah melaporkannya ke Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Alasan dipilihnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Jawa Tengah karena .

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diuji peneliti menggunakan rumus Slovin dengan hasil:

$$n = \frac{150}{150 \times (0,1)^2 + 1}$$

$$n = 60$$

Dengan demikian besarnya sampel minimal berdasarkan rumus slovin yaitu 60. Pada penelitian ini menambah 2 sampel, sehingga menjadi 62 unit KSPPS yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster proportionate random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang terdiri dari kelompok-kelompok individu berdasarkan area sampling dengan jumlah proporsional dan diambil secara acak. Adapun sampel yang dipilih yaitu KSPPS di berbagai kabupaten yang berada di tingkat Jawa Tengah yang dipilih secara acak dengan jumlah yang proporsional, yaitu 62 unit KSPPS.

### Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif Penelitian

Analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian ditujukan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Statistik deskriptif variabel penelitian meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku/standar deviasi (*standard deviation*).

**Tabel 2.1**  
**Statistik Deskriptif Rasio**

	Jumlah sampel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Rasio Modal Sendiri	62	0,26	5,00	2,1939	1,52253
Rasio Kecukupan Modal	62	1,25	5,00	3,8508	1,63683
Rasio Pembiayaan Bermasalah	62	2,50	10,00	8,6694	2,29565
Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko	62	5,00	5,00	5,0000	0,00000
Rasio PPAP Terhadap PPAPWD	62	0,05	5,00	3,3194	3,95281
Rasio Biaya Operasional	62	1,00	4,00	2,0161	0,73534
Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	62	3,00	4,00	3,9677	0,17813
Rasio Efisiensi Pelayanan	62	0,50	0,50	0,5000	0,00000
Rasio Kas	62	2,50	10,00	6,6532	6,75144
Rasio Pembiayaan	62	1,25	5,00	3,8871	0,99556
Rasio Partisipasi Bruto	62	1,25	5,00	4,7782	0,73427
Rasio Promosi Ekonomi Anggota	62	1,25	5,00	4,3548	1,27520
Rasio Rentabilitas Aset	62	0,75	2,25	0,8226	0,29472
Rasio Rentabilitas Ekuitas	62	0,75	3,00	1,6089	1,97785
Rasio Kemandirian Operasional	62	1,00	4,00	2,1613	0,77234
Jumlah Sampel Valid	62				

Penilaian kesehatan rasio-rasio dalam aspek kinerja keuangan syariah pada 62 KSPPS menghasilkan beberapa kriteria kesehatan rasio, dimana kriteria tersebut menunjukkan nilai dominan/modus. Hasil penilaian kesehatan rasio pada setiap aspek yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Penilaian Kesehatan Rasio pada Aspek Permodalan**

Kriteria Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Kecukupan Modal	Jumlah Sampel
Kurang sehat	24	Sehat	39
Tidak Sehat	20	Tidak Sehat	16
Sehat	12	Cukup Sehat	5
Cukup Sehat	6	Kurang Sehat	2
Total	62	Total	62

**Tabel 3.2**  
**Hasil Penilaian Kesehatan Aspek Kualitas Aktiva Produktif**

Kriteria Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio PPAP terhadap PPAPWD	Jumlah Sampel
Lancar	54	Tidak Berisiko	62	Lancar	35
Kurang Lancar	5	Cukup Berisiko	0	Macet	14
Cukup Lancar	3	Kurang Berisiko	0	Diragukan	9
Tidak Lancar	0	Sangat Berisiko	0	Kurang Lancar	4



Kriteria Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio PPAP terhadap PPAPWD	Jumlah Sampel
Total	62	Total	62	Total	62

**Tabel 3.3**  
**Hasil Penilaian Kesehatan Aspek Efisiensi**

Kriteria Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Efisiensi Pelayanan	Jumlah Sampel
Kurang Efisien	38	Baik	60	Tidak Baik	62
Tidak Efisien	13	Cukup Baik	2	Baik	0
Cukup Efisien	8	Kurang Baik	0	Cukup Baik	0
Efisien	3	Tidak Baik	0	Kurang Baik	0
Total	62	Total	62	Total	62

**Tabel 3.4**  
**Hasil Penilaian Kesehatan Aspek Likuiditas**

Kriteria Rasio Kas	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima	Jumlah Sampel
Likuid	18	Cukup Likuid	29
Cukup Likuid	17	Likuid	22
Kurang Likuid	15	Kurang Likuid	10
Tidak Likuid	12	Tidak Likuid	1
Total	62	Total	62

**Tabel 3.5**  
**Hasil Penilaian Kesehatan Aspek Jati Diri Koperasi**

Kriteria Rasio Partisipasi Bruto	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Promosi Ekonomi Anggota	Jumlah Sampel
Tinggi	56	Bermanfaat	48
Kurang	3	Tidak Bermanfaat	6
Cukup	2	Kurang Bermanfaat	6
Rendah	1	Cukup Bermanfaat	2
Total	62	Total	62

**Tabel 3.6**  
**Hasil Penilaian Kesehatan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan**

Kriteria Rasio Rentabilitas Aset	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Ekuitas	Jumlah Sampel	Kriteria Rasio Kemandirian Operasional	Jumlah Sampel
Rendah	58	Rendah	32	Kurang	42
Cukup	2	Tinggi	16	Rendah	8
Kurang	2	Cukup	9	Cukup	6
Tinggi	0	Kurang	5	Tinggi	6
Total	62	Total	62	Total	62

Setelah dilakukan penilaian kesehatan rasio pada masing-masing aspek, maka dilakukan rekapitulasi skor pada setiap aspek, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, serta kemandirian dan pertumbuhan. Dari rekapitulasi aspek, akan menghasilkan nilai pada masing-masing aspek kinerja keuangan syariah KSPPS.

**Tabel 4.1**  
**Nilai Aspek-aspek Kinerja Keuangan Syariah KSPPS**

Aspek	Hasil Skor	Total Skor Maksimal	Persentase	Nilai
Permodalan	374,77	620	60,45%	Kurang
Kualitas Aktiva Produktif	1053,30	1240	84,94%	Baik
Efisiensi	402	620	64,84%	Kurang
Likuiditas	653,50	930	70,27%	Sedang
Jati Diri Koperasi	566,25	620	91,33%	Baik
Kemandirian dan Pertumbuhan	284,75	620	45,93%	Kurang

Setelah dilakukan penilaian pada setiap aspek, maka dilakukan pengujian statistik deskriptif pada keseluruhan aspek kinerja keuangan syariah. Dari pengujian statistik deskriptif, akan menghasilkan kondisi kinerja keuangan syariah KSPPS.

**Tabel 5.2**  
**Statistik Deskriptif Aspek-aspek Kinerja Keuangan Syariah KSPPS**

Aspek	Jumlah	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Aspek-Aspek Kinerja Keuangan Syariah KSPPS	6	45,93	91,33	69,6267	16,58072
Jumlah Valid	6				

Penilaian kesehatan kinerja keuangan syariah pada 62 KSPPS tingkat Jawa Tengah menghasilkan peringkat skor terbaik, yang dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Peringkat Skor Kinerja Keuangan Syariah 15 Terbaik (Tertinggi)**

No.	Nama KSPPS	Lokasi	Skor
1.	KSPS Sumber Dana Barokah	Rowosari, Kendal	68,25
2.	Koperasi BMT El-Labana	Ngaliyan, Semarang	65,50
3.	KSU BMT Ar-Rahmah	Karanggede, Boyolali	64,25
4.	KSPPS Al Mu'aawanah	Bringin, Semarang	64
5.	KSPPS Al Huda	Wonosobo	60,65
6.	KSPPS Melati	Sapuran, Wonosobo	60,50
7.	KSU Syariah Angesthi Luhur Sejahtera	Laweyan, Surakarta	59,00
8.	KSPPS BMT Alhikmah Semesta	Mlonggo, Jepara	58,75
9.	KSPPS Bina Niaga Utama	Pedurungan, Semarang	58,60
10.	KSPPS BMT Syirkah Muawanah	Kramat, Tegal	58,25
11.	KSPPS Anda	Sidomukti, Salatiga	58,00
12.	KSPPS BMT Bahtera	Pekalongan Timur, Pekalongan	57,75

No.	Nama KSPPS	Lokasi	Skor
13.	BMT Al-Hikmah	Ungaran Timur, Semarang	57,50
14.	KSPPS Cemerlang	Weleri, Kendal	57,50
15.	KSPPS Samara (Sakinah Mawaddah Wa Rahmah)	Grogol, Sukoharjo	57,50

### Interpretasi Hasil

Analisis terhadap 6 aspek kuantitatif (kinerja keuangan syariah) dalam penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Provinsi Jawa Tengah, menghasilkan kriteria kesehatan pada masing-masing rasio yang terdapat pada aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, serta kemandirian dan pertumbuhan. Analisis tersebut juga menunjukkan peringkat skor berdasarkan 15 KSPPS terbaik dan 15 KSPPS terendah, sehingga akan diketahui KSPPS yang memiliki skor tertinggi maupun terendah berdasarkan 6 aspek kuantitatif.

Analisis penilaian kesehatan aspek permodalan menghasilkan kriteria pada rata-rata rasio modal sendiri terhadap total aset sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Kurang Sehat. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio modal sendiri, yaitu kriteria Kurang Sehat. Kriteria pada rata-rata rasio kecukupan modal sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Sehat. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio kecukupan modal, yaitu kriteria Sehat.

Aspek permodalan pada penelitian ini bernilai Kurang. Hal tersebut membuktikan bahwa KSPPS tingkat Jawa Tengah kurang dalam memenuhi modal sendiri, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, cadangan tujuan risiko, modal penyertaan, modal penyertaan, modal sumbangan, dan SHU belum dibagi. Aset yang dimiliki oleh KSPPS lebih banyak diperoleh dari simpanan di luar simpanan pokok dan simpanan wajib, seperti simpanan di bank ataupun di KSPPS lain (piutang dan pembiayaan). Hal tersebut akan berisiko mengalami kerugian jika KSPPS tidak mampu menutupi risiko dengan modal sendiri yang dimiliki. Dengan demikian, dianjurkan bagi KSPPS untuk meningkatkan modal sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan pelayanan yang baik kepada anggota, dan meningkatkan jumlah anggota. Hal tersebut dilakukan agar permodalan KSPPS semakin kuat, mampu menutupi risiko kerugian atas aktiva yang dimiliki, dan mengembangkan usaha KSPPS dengan modal yang dimiliki.

Analisis penilaian kesehatan aspek kualitas aktiva produktif menghasilkan kriteria pada rata-rata piutang dan pembiayaan bermasalah sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Kurang Lancar. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio piutang dan pembiayaan bermasalah, yaitu kriteria Kurang Lancar. Kriteria pada rata-rata rasio portofolio pembiayaan berisiko sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Tidak Berisiko. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio portofolio pembiayaan berisiko, yaitu kriteria Kurang Lancar. Kriteria pada rata-rata rasio PPAP terhadap PPAPWD yaitu Kurang Lancar, tidak sama dengan kriteria pada nilai dominannya yaitu Lancar. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan menjauhi atau tidak serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan tidak normal dan rata-rata yang dihasilkan tidak akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio PPAP terhadap PPAPWD, sehingga nilai yang dijadikan parameter adalah nilai dominan, yaitu kriteria Lancar.

Aspek kualitas aktiva produktif pada penelitian ini bernilai Baik. Hal tersebut membuktikan bahwa KSPPS tingkat Jawa Tengah lancar dalam menerima dana dari piutang dan pembiayaan yang disalurkan kepada anggota dan non anggota, sehingga KSPPS tidak memiliki risiko kerugian terhadap pinjaman yang diberikan, portofolio, maupun pembiayaan bermasalah, dikarenakan keterlambatan pengembalian kurang dari 30 hari atau bahkan tidak terlambat. KSPPS tingkat Jawa Tengah juga optimal dalam menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Dengan demikian, dianjurkan bagi KSPPS tingkat Jawa Tengah agar tetap menjaga kelancaran dalam menerima dana dengan cara memantau peminjam (anggota dan non anggota) dan meningkatkan penyisihan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

Analisis penilaian kesehatan aspek efisiensi menghasilkan kriteria pada rata-rata biaya operasional sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Kurang Efisien. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio biaya operasional, yaitu kriteria Kurang Efisien. Kriteria pada rata-rata rasio aktiva tetap sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio aktiva tetap, yaitu kriteria Baik. Kriteria pada rata-rata rasio efisiensi pelayanan sama dengan kriteria pada nilai dominannya yaitu kriteria Tidak Baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio efisiensi pelayanan, yaitu kriteria Tidak Baik.

Aspek efisiensi pada penelitian ini bernilai Kurang. Hal tersebut membuktikan bahwa KSPPS tingkat Jawa Tengah belum cukup mampu dalam memberikan pelayanan yang efisien pada anggotanya, belum cukup mampu membiayai kegiatan operasional dengan partisipasi (pendapatan) bruto yang dimiliki. Gaji dan honor juga tidak mampu menutupi piutang dan pembiayaan anggota yang terlampaui tinggi. Hal tersebut mengakibatkan SHU bagian anggota yang dihasilkan menjadi rendah. Dengan demikian, dianjurkan bagi KSPPS tingkat Jawa Tengah untuk mengurangi kegiatan operasional agar partisipasi bruto lebih optimal dalam menghasilkan SHU, bukan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional. KSPPS tingkat Jawa Tengah juga perlu lebih efisien dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk melayani anggota, dan mengoptimalkan jumlah anggota dengan baik agar gaji dan honor dapat mengantisipasi ketidakefisienan piutang dan pembiayaan. Dengan demikian, KSPPS Jawa Tengah dapat memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimiliki.

Analisis penilaian kesehatan aspek likuiditas menghasilkan kriteria pada rata-rata rasio kas yaitu Kurang Likuid, tidak sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Likuid. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan menjauhi atau tidak serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan tidak normal dan rata-rata yang dihasilkan tidak akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio modal sendiri, sehingga nilai yang dijadikan parameter adalah nilai dominan, yaitu kriteria Likuid. Kriteria pada rata-rata pembiayaan terhadap dana yang diterima sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Cukup Likuid. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima, yaitu kriteria Cukup Likuid.

Aspek likuiditas pada penelitian ini bernilai Sedang. Hal tersebut membuktikan bahwa KSPPS tingkat Jawa Tengah cukup mampu dalam mengelola dana kasnya untuk melunasi kewajiban lancarnya, dan cukup mampu dalam memanfaatkan piutang dan pembiayaan untuk

memenuhi dana yang diterima (kewajiban). Sehingga, kas, pembiayaan dan piutang dapat tersalurkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban KSPPS. Dengan demikian, dianjurkan bagi KSPPS tingkat Jawa Tengah untuk meningkatkan kas, bank maupun aktiva lancar lain seperti piutang dan pembiayaan anggota maupun non anggota agar semakin optimal dalam menutupi atau melunasi kewajiban-kewajiban KSPPS. Kemudian, KSPPS dianjurkan untuk meminimalisir kewajiban lancarnya agar kas ataupun aktiva lancarnya bisa tersalurkan dengan baik. Dengan demikian, likuiditas KSPPS tetap terjaga dengan baik demi keberlangsungan ketahanan KSPPS dalam memenuhi kewajibannya.

Analisis penilaian kesehatan aspek jati diri koperasi menghasilkan kriteria pada rata-rata rasio partisipasi bruto sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Tinggi. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio partisipasi bruto yaitu kriteria Tinggi. Kriteria pada rata-rata rasio promosi ekonomi anggota sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Bermanfaat. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio promosi ekonomi anggota, yaitu kriteria Bermanfaat.

Aspek jati diri koperasi pada penelitian ini bernilai Baik. Hal tersebut membuktikan bahwa KSPPS tingkat Jawa Tengah sudah mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan anggotanya dan mempromosikan ekonomi anggotanya, dikarenakan telah memberikan pelayanan kepada anggota dengan baik dan kontribusi anggota kepada KSPPS atas pinjaman atau pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi non anggota kepada KSPPS. Sehingga KSPPS dalam menerima partisipasi jasa pinjaman atau pembiayaan dan partisipasi jasa provisi dari anggota menjadi tinggi. Dengan demikian, dianjurkan bagi KSPPS tingkat Jawa Tengah agar mempertahankan kemampuannya yang baik dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan memberikan manfaat ekonomi partisipasi, manfaat efisiensi biaya, dan SHU kepada anggota.

Analisis penilaian kesehatan aspek kemandirian dan pertumbuhan menghasilkan kriteria pada rata-rata rasio rentabilitas aset sama dengan kriteria pada nilai dominannya, yaitu kriteria Rendah. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio rentabilitas aset, yaitu kriteria Rendah. Kriteria pada rata-rata rasio rentabilitas ekuitas yaitu kriteria Kurang, tidak sama dengan kriteria pada nilai dominannya yaitu kriteria Rendah. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan menjauhi atau tidak serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan tidak normal dan rata-rata yang dihasilkan tidak akurat dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio rentabilitas ekuitas, sehingga nilai yang dijadikan parameter adalah nilai dominan, yaitu kriteria Rendah. Kriteria pada rata-rata rasio kemandirian operasional sama dengan kriteria pada nilai dominannya yaitu kriteria Kurang. Hal tersebut terjadi dikarenakan standar deviasi yang dihasilkan mendekati atau hampir serupa dengan rata-rata, yang artinya sebaran data yang dihasilkan normal dan rata-rata yang dihasilkan akurat untuk dijadikan sebagai parameter yang tepat untuk mewakili semua data pada rasio kemandirian operasional, yaitu kriteria Kurang.

.Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada penelitian ini bernilai Rendah. Hal tersebut membuktikan KSPPS tingkat Jawa Tengah tidak mampu dalam menghasilkan partisipasi bruto dan SHU atas pengelolaan aset lancar, modal sendiri, dan kegiatan operasional. Dengan demikian, dianjurkan bagi KSPPS tingkat Jawa Tengah untuk meningkatkan pengelolaan terhadap aset lancar dengan memberikan pinjaman dan pembiayaan, meningkatkan pengelolaan modal sendiri dengan menambah simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal lain, agar KSPPS mampu mengembangkan usahanya lebih baik. Dengan demikian, akan membantu KSPPS untuk meningkatkan partisipasi bruto dan SHU sebelum pajak dan zakat, serta SHU bagian anggota.

Pada analisis peringkat skor 15 terbaik (tertinggi) dari 62 KSPPS tingkat Jawa Tengah dalam penilaian kesehatan kinerja keuangan syariah yaitu peringkat terbaik diperoleh dari KSPPS Sumber Dana Barokah dan sebagian besar KSPPS menghasilkan skor minimum pada aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPPS. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar KSPPS terbaik tingkat Jawa Tengah masih memiliki kemampuan yang rendah dalam menghasilkan partisipasi bruto dan SHU. Oleh karena itu, KSPPS tersebut dianjurkan meningkatkan pengelolaan terhadap aset lancar dengan memberikan pinjaman dan pembiayaan, meningkatkan pengelolaan modal sendiri agar KSPPS mampu mengembangkan usahanya lebih baik. Dengan demikian, akan membantu KSPPS untuk meningkatkan partisipasi bruto dan SHU sebelum pajak dan zakat, serta SHU bagian anggota.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada analisis aspek permodalan, rasio modal sendiri terhadap total aset menghasilkan 12 KSPPS berkriteria Sehat, 6 KSPPS berkriteria Cukup Sehat, 24 KSPPS berkriteria Kurang Sehat, dan 20 KSPPS berkriteria Tidak Sehat. Pada rasio kecukupan modal (CAR) menghasilkan 39 KSPPS berkriteria Sehat, 5 KSPPS berkriteria Cukup Sehat, 2 KSPPS berkriteria Kurang Sehat, dan 16 KSPPS berkriteria Tidak Sehat.
2. Pada analisis aspek kualitas aktiva produktif, rasio piutang dan pembiayaan bermasalah menghasilkan 54 KSPPS berkriteria Lancar, 3 KSPPS berkriteria Cukup Lancar, 5 KSPPS berkriteria Kurang Lancar, dan 0 KSPPS berkriteria Tidak Lancar. Pada rasio portofolio piutang terhadap pembiayaan berisiko menghasilkan 62 KSPPS tingkat Jawa Tengah berkriteria Tidak Berisiko. Pada rasio PAPP terhadap PPAPWD menghasilkan 35 KSPPS berkriteria Lancar, 4 KSPPS berkriteria Kurang Lancar, 9 KSPPS berkriteria Diragukan, dan 14 KSPPS berkriteria Macet.
3. Pada analisis aspek efisiensi, rasio biaya operasional pelayanan menghasilkan 3 KSPPS berkriteria Efisien, 8 KSPPS berkriteria Cukup Efisien, 38 KSPPS berkriteria Kurang Efisien, dan 13 KSPPS berkriteria Tidak Efisien. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset menghasilkan 60 KSPPS berkriteria Baik, 2 KSPPS berkriteria Cukup Baik, 0 KSPPS berkriteria Kurang Baik, dan 0 KSPPS berkriteria Tidak Baik. Pada rasio efisiensi pelayanan menghasilkan 62 KSPPS di Jawa Tengah berkriteria Tidak Baik.
4. Pada analisis aspek likuiditas, rasio kas menghasilkan 18 KSPPS berkriteria Likuid, 17 KSPPS berkriteria Cukup Likuid, 15 KSPPS berkriteria Kurang Likuid, dan 12 KSPPS berkriteria Tidak Likuid. Pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima menghasilkan 22 KSPPS berkriteria Likuid, 29 KSPPS berkriteria Cukup Likuid, 10 KSPPS berkriteria Kurang Likuid, dan 1 KSPPS berkriteria Tidak Likuid.
5. Pada analisis aspek jati diri koperasi, rasio partisipasi bruto menghasilkan 56 KSPPS berkriteria Tinggi, 2 KSPPS berkriteria Cukup, 3 KSPPS berkriteria Kurang, dan 1 KSPPS berkriteria Rendah. Pada rasio PEA menghasilkan 48 KSPPS berkriteria Bermanfaat, 2 KSPPS berkriteria Cukup Bermanfaat, 6 KSPPS berkriteria Kurang Bermanfaat, dan 6 KSPPS berkriteria Tidak Bermanfaat.
6. Pada analisis aspek kemandirian dan pertumbuhan, rasio rentabilitas aset menghasilkan 0 KSPPS berkriteria Tinggi, 2 KSPPS berkriteria Cukup, 2 KSPPS berkriteria Kurang, dan 58 KSPPS berkriteria Rendah. Pada rasio rentabilitas ekuitas diperoleh hasil 16 KSPPS berkriteria Tinggi, 9 KSPPS berkriteria Cukup, 5 KSPPS berkriteria Kurang, dan 32 KSPPS berkriteria Rendah. Pada rasio kemandirian operasional menghasilkan 6 KSPPS berkriteria Tinggi, 6 KSPPS berkriteria Cukup, 42 KSPPS berkriteria Kurang, dan 8 KSPPS berkriteria Rendah.
7. Rata-rata dari aspek-aspek kinerja keuangan syariah KSPPS tingkat Jawa Tengah bernilai Sedang. Aspek kinerja keuangan syariah terbaik pada penelitian ini adalah aspek jati diri koperasi dengan nilai Baik, sedangkan aspek kinerja keuangan syariah terjelek adalah aspek kemandirian dan pertumbuhan dengan nilai Tidak Baik.

8. KSPPS yang memiliki skor tertinggi yaitu KSPS Sumber Dana Barokah dengan skor 68,25, yang berlokasi di Rowosari, Kendal.

### Keterbatasan dan Saran

Adapun keterbatasan dan saran dalam penelitian ini agar dapat diperhatikan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini, aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan aspek dengan skor terendah dan menghasilkan nilai Tidak Baik. Dengan demikian, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti aspek kemandirian dan pertumbuhan pada KSPPS.
2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan KSPPS tingkat Jawa Tengah tahun 2016. Dalam melakukan penelitian, terdapat laporan keuangan yang belum sesuai dengan undang-undang perkoperasian dan terdapat laporan keuangan yang salah dalam perhitungan. Dengan demikian, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menganalisis audit laporan keuangan KSPPS.

### REFERENSI

- Asdhiwitanto, R., Dwiantmanto, dan Azizah, D. F. 2015. "Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus pada Koperasi Primer Tursina, Surabaya)." *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 28, No. 2, h.1–9.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2016*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2014. "BI Tegaskan Indonesia sebagai Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia." h.n.p., <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Indonesia-Kiblat-Baru-Keuangan-Syariah-Dunia.aspx>. Diakses tanggal 27 Oktober 2017.
- Bank Indonesia. 2016. *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2017. *Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera*. Makassar.
- Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Humas Kemenkop. 2016. "Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia Sangat Baik." h.n.p., <http://www.dekop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/>. Diakses tanggal 27 Oktober 2017.
- Karim, F. R. 2017. "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kemenkop UKM. 2016. *Membangun Koperasi Dan UMKM Mandiri, Kreatif dan Bersaing Tinggi (Laporan Tahunan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah)*. Jakarta.
- Sukmana, A. A. 2015. "Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2, h.125-144.